

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar Nur Dewata, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, FH UMY, Yogyakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Arikunto, Suharsimi, 2003, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Bina Aksara, Jakarta
- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Asis, Abd. dan Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta
- Atmasasmita, Romli 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta
- Azhary, M. Tahir, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Hamzah, Andi 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- 2010, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hermawan, Asep, 2008, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, PT Grasindo, Jakarta

2009, *Penelitian Bisnis*, PT. Grasindo, Jakarta

Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Pembuktian Hukum*, Erlangga, Jakarta

————— 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

————— 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kusumaatmadja, Mochtar, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung

Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Pattiwael, Petra M.E.J., dan Archie Michael Hasudungan, 2011, *Diktat Hukum Acara Pidana*, lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta

————— 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Riyanto, Sigit, *et.al.* 2013, *Keterampilan Hukum: Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi, dan Praktisi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Soetarna, Hendar, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung,

Sukmadinata, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Sunaryo, Sidik 2004, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang

Surjono, Herman Dwi, 1996, Pengembangan Pendidikan TI di Era Global, Pendidikan Teknik Informatika, FT UNY, Yogyakarta

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Widiartama, G dan Al. Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran N Egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Permendagri No.33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Depdagri Dan Pemda

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang

C. Internet dan Karya Ilmiah

Berita Semarang, "Tahun 2017, Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang Menurun", *www.beritasemarang.net*, 3 Maret 2018

Fella Miftaqul Jannah, 2017, "Analisis Penerapan E-Tilang Terhadap Masyarakat", *Tugas Metodologi Penelitian*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, Bandung

Forum Komunikasi FH UNPAS, "Istilah dalam Ilmu Hukum (FH UNPAS)", *www.forumkomunikasifhunpas.blogspot.com*, 25 Februari 2018

Hukum Online, "Alat Bukti Rekaman", *www.hukumonline.com*, 15 Februari 2018

————— "Apakah Penerima Surat Tilang Otomatis Jadi Tersangka?", *www.hukumonline.com*, 20 Juni 2018

————— "Lafal Sumpah di Pengadilan Bagi Penganut Kepercayaan", *www.hukumonline.com*, 2 Juli 2018

————— "Alat Bukti 'Petunjuk' akan Dihilangkan dari KUHP", *www.hukumonline.com*, 5 Juli 2018

Jimly Asshidiqie, "Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia, Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *www.pemantauan-peradilan.com*, 10 Januari 2018.

KOMPAS, “Menkominfo Tegaskan CCTV Bisa Jadi Alat Bukti Hukum yang Sah”, *www.nasional.kompas.com*, 15 Februari 2018

Liputan 6, “Ini Cara Bayar Denda Lewat E-Tilang”, *www.news.liputan6.com*, 13 Februari 2018

Miko Ginting dkk, 2015, “Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri”, *Laporan Penelitian*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta

POLRI, “Struktur Organisasi Polri”, *www.polri.go.id*, 4 Juni 2018

SATLANTAS POLRESTABES SEMARANG, “Tugas dan Tanggung Jawab Satlantas”, *www.satlantas-polrestabessemarang.blogspot.com*, 30 Mei 2018

Setiyanto dkk, 2017, “Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Penelitian Dosen*, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang

Tribun Kaltim, “Memahami Tugas Dinas Perhubungan”, *www.kaltim.tribunnews.com*, 30 Mei 2018

Warta Kota, “Polri: Angka Kecelakaan Lalu-lintas Indonesia Termasuk Tertinggi di ASEAN”, *www.wartakota.tribunnews.com*, 9 Februari 2018

Yusti Purba, “Saksi Berantai (*Kettingbewijs*) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, *www.kompasiana.com*, 5 Mei 2018